
Representasi Demokrasi Informasi Sebagai Strategi Pengembangan Perpustakaan Dalam Ekosistem Digital

Studi Teoritis Pendekatan dalam Membangun Open Access pada Perpustakaan Perguruan Tinggi di Malang

Drs. Hartono, SS, MHum

Email: hartono_hary@yahoo.co.id

Abstrak

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi antara lain perubahan pada segala aspek kehidupan masyarakat. Perubahan perilaku masyarakat dalam mendapatkan informasi serta semakin tinggi tuntutan kebutuhan informasi juga sangat bervariasi. Peran lembaga informasi termasuk perpustakaan dalam mengembangkan kualitas layanan perpustakaan sebagai tuntutan kebutuhan informasi yang tidak dapat terhindarkan. Dalam dinamikanya perpustakaan tidak saja membangun kualitasnya dalam layanan konvensional dengan mengandalkan kepemilikan koleksi dan koleksi tercetaknya, namun perpustakaan harus mengalami metamorfosa membangun layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi ke dalam era informasi. Dalam makalah ini mencoba mengkaji dengan memaparkan bagaimana modernisasi perpustakaan dalam membangun aksesibilitas informasi dalam ekosistem digital.

Dalam ekosistem digital perpustakaan menjadikan sentral dalam berbagai perubahan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menuntut layanan informasi yang cepat, tepat, mudah dan murah serta nyaman tanpa harus datang langsung perpustakaan dapat mengakses informasi. Berbagai factor penting dalam pengembangan perpustakaan digital yang perlu diperhatikan dalam pembahasan diatas adalah faktor manajemen perpustakaan digital itu sendiri. Implementasi demokrasi informasi sebagai bentuk perpustakaan perguruan tinggi dalam membangun keterbukaan informasi (open access) melalui pendekatan sistem informasi, kebutuhan informasi dan teknologi informasi maupun budaya. Keberhasilan sebuah pembangunan perpustakaan digital tidak hanya pada masalah implementasi teknologi informasi saja namun juga dari berbagai pendekatan demokrasi informasi dalam upaya membangun aksesibilitas informasi.

Representasi demokrasi informasi perpustakaan dalam ekosistem digital pada Perpustakaan Perguruan Tinggi di Malang antara lain (1) Penguatan dalam keterbukaan informasi dengan mengembangkan open access, (2) Modernitas teknologi dan aksesibilitas informasi ((3) Pengembangan layanan perpustakaan berbasis budaya Indonesia dan Humanisme. Dalam hal ini tugas perpustakaan adalah menghimpun, mengorganisasi, melestarikan dan mendiseminasikan koleksi beraneka ragam budaya Indonesia, membangun modernitas teknologi dan aksesibilitas informasi serta membangun jaringan kerjasama perpustakaan digital baik pada lingkup nasional dan internasional.

Kata Kunci :

perpustakaan,
demokrasi informasi,
ekosistem digital,
aksesibilitas informasi

A. PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi antara lain ditandai dengan perubahan pada segala aspek kehidupan masyarakat. Perubahan perilaku masyarakat dalam mendapatkan informasi serta semakin tinggi tuntutan kebutuhan informasi juga sangat bervariasi. Peran lembaga informasi termasuk perpustakaan dalam mengembangkan kualitas layanan perpustakaan sebagai tuntutan kebutuhan informasi yang tidak dapat dihindarkan. Dalam dinamikanya perpustakaan tidak saja membangun kualitasnya dalam layanan konvensional dengan mengandalkan kepemilikan koleksi dan koleksi tercetaknya, namun perpustakaan harus mengalami metamorfosa membangun layanan perpustakaan secara terbuka berbasis teknologi informasi.

Transformasi perpustakaan dalam era informasi yang ditandai dengan adanya perubahan peran dan fungsi perpustakaan seiring dengan pandangan Ranganathan bahwa perpustakaan merupakan organisasi yang tumbuh *“growing organism”*. Perpustakaan yang tumbuh dan berkembang yang mampu beradaptasi dalam perkembangan zaman. Kemajuan iptek dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut mengharuskan perpustakaan digital sebagai lembaga demokratis dalam membangun aksesibilitas informasi tersebut sebagai upaya pemenuhan dalam tuntutan dan kebutuhan masyarakat dalam menjawab tantangan zaman. Kondisi tersebut juga berimbas dalam membangun layanan perpustakaan yang dapat diakses secara menyeluruh dan terbuka (*open access*).

Heterogenitas sumber informasi dan variasi informasi yang beragam pada perpustakaan bahwa berbagai jenis karya tulis, karya cetak, karya rekam dan karya digital dan kompleksitas layanan perpustakaan digital mengharuskan aksesibilitas informasi perpustakaan digital yang semakin canggih dan profesional. Kecanggihan aksesibilitas

informasi merupakan faktor kunci dalam mencari sumber informasi yang memungkinkan koleksi dapat ditemukan dengan cepat, mudah dan akurat.

Perpustakaan digital dengan berbagai inovasinya telah merambah pada segala aspek kehidupan masyarakat, bukan saja untuk kebutuhan mencari informasi di lingkungan pendidikan tinggi saja namun sudah merambah kepada seluruh lapisan masyarakat. Calhoun menjelaskan bahwa hadirnya era informasi sebagai wujud dalam emergensi informasi dalam membangun dunia baru dalam keterbukaan informasi (*open access*). Kehadiran perpustakaan digital sebagai perubahan mendasar dalam kegiatan penghimpunan, penyimpanan, organisasi informasi, pelestarian dan desiminasi informasi dalam format digital (Calhoun, 2014).

Gambaran perbandingan perpustakaan digital dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Ringkasan Implementasi Pengembangan Perpustakaan Digital Pada Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri di Malang Jawa Timur

No.	Aspek Implementasi	Universitas Brawijaya (UB)	Universitas Negeri Malang (UM)	Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
1.	Software	Inlis Lite Versi 3 Berbasis Indomarc Website www.digilib,ub,ac,id	Sipadu Berbasis Lokal Website : www.lib.um.ac.id	E-Print dan Slims Berbasis dublin core Website www.digilib.uin.ac.id
2.	Hardware	komputer, server, jaringan dan komputer client baik di dalam perpustakaan maupun di terraz dan Gazebo.	komputer, server, jaringan dan komputer client di Perpustakaan maupun di Terraz	komputer, server, jaringan dan Komputer client di Perpustakaan.
3.	Database	Gazebo, BKG Corner, Sampurna Corner	Café Pustaka disertai Wifi/hotspot	E-Thesis dan Arabic Corner dan Sudan Corner, BI Corner.
4.	Fasilitas	Brawijaya Knowledge Gerden dan Institutional Repository (IR) Mobile library	Muatan Lokal (MULOC), Café Pustaka disertai Wifi/hotspot	E-Thesis, Arabic Corner, Sudan Corner dan Institutional Repository (IR), bookdrop

Sumber : Sintesa Peneliti

Berdasarkan tabel perbandingan diatas bahwa implementasi perpustakaan digital pada Perpustakaan Perguruan Tinggi di Malang Jawa Timur sebagai berikut: pertama, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya (UB) Sistem informasi Inlis-Lite v.3, dengan database perpustakaan digital *Brawijaya Knowledge Garden (BKG)* serta pengembangan akses layanan digital pada Gazebo dan Terraz Digital. *Kedua*, pengembangan perpustakaan digital pada Perpustakaan Universitas Malang (UM) dengan sistem informasi Sipadu berbasis metadata local serta memiliki koleksi digital dengan database Mulok serta pengembangan akses pada Café Pustaka. Dan *ketiga*, profil pengembangan perpustakaan digital pada Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan mengimplementasikan sistem informasi Slims berbasis metadata *dublin core* dengan database E-These dan didukung Corner Pustaka. Ketersediaan koleksi, infrastruktur teknologi, sistem informasi perpustakaan digital belum menjamin dalam upaya membangun aksesibilitas informasi. Berbagai variasi dalam pengembangan perpustakaan digital menunjukkan kebebasan cara membangun kebebasan akses informasi mulai sistem database, sistem informasi dan kebijakan akses yang dilakukan oleh setiap melaksanakan pengembangan perpustakaan dalam ekosistem digital.

Representasi demokrasi informasi tersebut memungkinkan kehadiran kembali peran perpustakaan untuk membuka akses seluas-luasnya untuk mendapatkan informasi berbasis nilai-nilai budaya dan legalitas informasi (Hartono, 2019). Sejumlah faktor yang menunjukkan aksesibilitas informasi perpustakaan belum optimal yang disebabkan masalah kebijakan akses, keterbukaan akses informasi (*open access*) dan bahkan masalah sejarah masa lalu. Kondisi tersebut tentu belum semuanya benar perlu upaya menghadirkan kembali peran perpustakaan untuk mengembangkan demokrasi informasi perpustakaan dalam ekosistem

digital. Demokrasi informasi memungkinkan upaya untuk menghimpun koleksi secara beragam, mengorganisasi secara profesional, dan membangun layanan secara bervariasi dan koleksi dapat diakses secara terbuka dengan memperhatikan kebutuhan dan minat seluruh pengguna yang beragam. Bertolak pemikiran diatas masalah representasi demokrasi informasi dalam pengembangan perpustakaan menjadi permasalahan dalam pengembangan layanan perpustakaan berbasis keterbukaan informasi (*open access*) pada Perpustakaan Perguruan Tinggi di Malang

B. KAJIAN TEORITIS

1. Konsep Demokrasi Informasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi mengandung pengertian (a) bentuk atau sistem pemerintah yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; atau (b) gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan dan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dalam konteks yang lebih luas pengembangan perpustakaan digital bahwa nilai demokrasi didasarkan sebuah kebebasan dalam menyediakan dan mengakses informasi secara terbuka (*open access*). Prinsip demokrasi mengandung makna berintegrasi dalam nilai demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. Dalam konteks pengembangan perpustakaan digital, ketiganya merupakan prinsip yang mendasari nilai multikultural baik pada level ide, proses, maupun gerakan.

Demokrasi informasi merupakan fenomena pemerataan akses informasi perpustakaan dalam membangun layanan masyarakat Indonesia yang adil dan merata berdasarkan azas keadilan dan pemerataan terhadap informasi yang tidak membedakan suku, ras, agama, status sosial dan budaya. Demokrasi informasi merupakan sebuah

upaya akses informasi secara terbuka (*open access*) kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini demokrasi informasi merupakan pandangan dalam membangun keterbukaan informasi yang dilayankan perpustakaan baik dalam bentuk karya rekam, karya cetak, karya tulis maupun digital yang dapat diakses secara online.

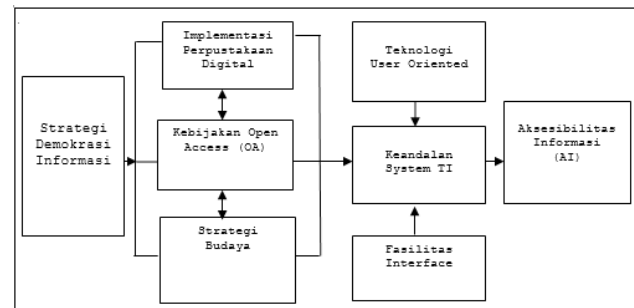
Mengembangkan demokrasi informasi dalam konteks nilai keberagaman budaya sebagaimana dalam Buku Manifesto IFLA (2008) yang berjudul *Multikultural Communities : Guidelines for Library Services*, bahwa untuk membangun kualitas layanan perpustakaan sebuah perpustakaan perlu mengembangkan nilai-nilai keragaman budaya (*multicultural*) (IFLA, 2009). Pengembangan sumber daya koleksi digital merupakan langkah awal dalam membangun perpustakaan. Kegiatan pengembangan sumber daya koleksi digital dimaksudkan untuk memperluas koleksi yang dapat dilakukan melalui alih media, melanggan maupun link pada sumber eksternal. Dalam pengembangan koleksi digital merupakan upaya yang dilakukan oleh lembaga perpustakaan digital dalam memperluas koleksi perpustakaan digital berbasis literatur Indonesia.

Dalam ekosistem digital bahwa demokrasi informasi merupakan aktivitas dalam mendapatkan akses informasi secara terbuka (*open access*) dari berbagai sumber informasi antara lain akses informasi melalui media sosial, lembaga informasi maupun perpustakaan. Demokrasi informasi ditengarai akses terbuka secara bebas untuk mendapatkan informasi baik dalam bentuk tercetak, tertulis, terekam maupun digital. Keterbukaan informasi memungkinkan akses secara bebas bagi informasi sehingga masyarakat dapat mendapat akses secara bebas merata namun juga bertanggung jawab. Peran perpustakaan dalam membangun demokrasi informasi menjadikan faktor penting dalam menghimpun informasi digital secara terseleksi, mengorganisasi informasi digital secara

profesional, melestarikan koleksi digital secara tepat, mendiseminasikan informasi digital.

Masalah aksesibilitas informasi merupakan faktor utama dalam upaya pengembangan perpustakaan digital tidak lepas dari kemajuan teknologi informasi baik dari aspek infrastruktur teknologi *hardware, software, brainware* serta jaringan informasi (*networks*). Di samping itu juga memperhatikan dalam aksesibilitas informasi yang dilakukan dalam aspek kebutuhan informasi (*information needs*) dan pencarian informasi (*information seeking*) (Case,2012). Menurut Saracevic (2001) dalam upaya mengembangkan perpustakaan digital dalam membangun aksesibilitas informasi yang dipengaruhi oleh teknologi yang berkaitan dengan pengguna (*user oriented*), keandalan sistem (*system centered*) dan fasilitas antar muka (*interface*). Gambaran strategi pengembangan perpustakaan digital dalam membangun aksesibilitas informasi di penelitian ini dapat dipahami sebagai proses yang melibatkan tiga pendekatan, antara lain pendekatan manajemen, teknologi, dan pendekatan budaya sebagaimana digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1
 Strategi Pengembangan Demokrasi dalam
 Membangun Aksesibilitas Informasi



Sumber : Sintesis Peneliti

Berdasarkan representasi perpustakaan sebagaimana database Perpustakaan Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia memiliki koleksi perpustakaan berbagai jenis dan variasi yang terdiri karya tercetak, terekam, tertulis maupun digital. Dari sebagian koleksi tersebut memiliki koleksi-koleksi digital yang cukup besar jumlahnya meliputi koleksi

digital teks, film, video, audio yang bisa dapat diakses secara *offline* maupun *online* melalui website. Disisi lain perpustakaan juga membangun otomasi secara terintegrasi, mengembangkan alih media koleksi, layanan internet, layanan wifi/hotspot dalam gazebo dan layanan sumber elektronik (*e-resources*). Potensi sumber daya koleksi digital yang sangat besar tersebut perlu didukung dengan kebijakan, organisasi dan manajemen, teknologi dan kebijakan akses dan regulasi pada perpustakaan digital, yang memadai yang berdampak sangat besar dalam membangun aksesibilitas informasi dan kualitas layanan perpustakaan.

Doktrin Islam tentang prinsip demokrasi (*al-musyawahah*), kesetaraan (*al-musawawah*), dan keadilan (*al-'adl*) telah dipraktikkan oleh Rasulullah saw. untuk mengelola keragaman kelompok masyarakat di Madinah. Pada saat pertama kali memasuki kota Madinah, Nabi saw. misalnya membuat perjanjian tertulis yang populer dengan sebutan Piagam Madinah. Piagam Madinah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. memiliki kepedulian tinggi terhadap persoalan demokrasi, kesetaraan, dan keadilan antar etnis, antar ras dan antar agama. Selain itu, dua pasal Piagam Madinah juga mengandung pesan moral bahwa Nabi Muhammad saw. menolak adanya diskriminasi, hegemoni, dan dominasi dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Dengan demikian, dari perspektif modern, dua pasal pada Piagam Madinah tersebut dapat menjadi inspirasi untuk membangun masyarakat multikultural.

Dalam konteks pengembangan perpustakaan digital, nilai demokrasi merupakan nilai Islam yang sangat mempengaruhi keberhasilan tugas, fungsi, dan tujuan perpustakaan digital. Nilai Islam multikultural mampu mengembangkan demokrasi, kebebasan, dan keterbukaan akses (*open access*). Wiji Suwamo (2016) menjelaskan bahwa *open access* (disingkat OA) pada perpustakaan digital merupakan tuntutan kebutuhan informasi yang

dibutuhkan civitas akademika dan ilmuwan. Tugas perpustakaan digital untuk menyimpan karya-karya tulis baik berjenis *preprint* maupun *postprint*. Bersamaan dengan itu, perpustakaan digital juga menyediakan akses direktori tentang jurnal-jurnal yang bisa diakses secara gratis. Permasalahan dalam open access (OA) itu sendiri terkait masalah hak cipta.

Dalam konteks pengembangan perpustakaan digital bahwa nilai demokrasi merupakan nilai Islam yang sangat mempengaruhi keberhasilan tugas, fungsi dan tujuan perpustakaan digital. Nilai Islam multikultural mampu mengembangkan demokrasi melalui penyediaan informasi, pengembangan koleksi yang beragam, membangun layanan dan keterbukaan akses (*open access*).

2. Demokrasi Informasi, Perpustakaan Digital dan Budaya

Demokrasi merupakan istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat, yang dapat diarahkan dalam konteks secara teknis bahwa demokrasi merupakan peran pemerintah secara keterwakilan dalam melayani bagi masyarakat umum. Masyarakat masing-masing punya kalimat tersendiri dalam menerjemahkan kata demokrasi, secara sederhana, demokrasi mempunyai makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Berdasarkan makna tersebut, negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat sehingga segala sesuatu itu rakyat yang menentukan, sedangkan pemerintah hanyalah sebagai fasilitator yang mengarahkan agar tujuan rakyat dapat lebih terarah.

Nilai-nilai multikultural merupakan nilai yang penting untuk diterapkan di lingkungan perguruan tinggi, karena perguruan tinggi merupakan miniatur kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang majemuk baik dari sisi ras, gender, suku, agama, dan kelas sosial. Lebih lanjut, fakta empiris menunjukkan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang multikultural,

di antara entitas-entitas kultur yang ada akan terus selalu tarik-menarik berdasar kecenderungan dan kepentingan yang mereka miliki. Apabila hubungan kultural antara mereka yang berbeda latar belakang budaya tidak dipelihara, maka hal itu bisa menimbulkan disharmoni hubungan antara warga negara.

Menurut Aly (2011) bahwa prinsip demokrasi mengandung makna nilai demokrasi, kesetaraan dan keadilan. Dalam konteks pengembangan perpustakaan digital bahwa dan ketiganya merupakan prinsip yang mendasari nilai multikultural baik pada level ide, proses maupun gerakan. Ketiga prinsip tersebut menggarisbawahi bahwa semua anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi. Dalam kaitannya ini pengembangan perpustakaan berbasis nilai multikultural akan menjamin semua masyarakat memperoleh perhatian dan perlakuan yang sama dalam mendapatkan informasi tanpa membedakan latar belakang warna kulit, etnik, agama, bahasa dan budaya (Abdullah, 2011).

Mengingat pentingnya informasi, UUD 1945 pasal 28 (f) mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Lebih lanjut lagi, dengan ditetapkannya UU no 14 /2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membawa angin segar dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Terlebih pada masa pemerintahan sebelum reformasi, informasi ditutup sehingga masyarakat tidak bisa terlibat dalam proses pembangunan karena keterbatasan informasi yang diberikan.

Keterbukaan informasi juga akan membawa dampak positif bagi pemberantasan korupsi, artinya dengan diberikan akses masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam setiap rangkaian kegiatan

pemerintah mulai dari tahapan perencanaan hingga pada tahapan pertanggungjawaban. Dengan demikian, adanya partisipasi yang bermula dari pemberian akses informasi, niat jahat para elite untuk melakukan tindakan korupsi akan sedikit terkekang dikarenakan adanya pengontrolan dari masyarakat luas. Dan ini juga akan memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan pemerintahan yang baik karena pondasi utamanya sudah terbentuk. Sehingga secara sederhana dapat diartikan, keterbukaan informasi adalah wujud dari demokrasi.

3. Urgensi Perpustakaan dalam Ekosistem Digital

Dalam ekosistem digital sebuah perpustakaan memiliki berbagai keunggulan akan mendukung tugas-tugas profesional perpustakaan antara lain memiliki kemampuan dalam menyediakan informasi, mengorganisasi, menyimpan, mengelola informasi dan mendesiminasi informasi sekaligus melestarikan informasi. Namun demikian kemajuan dan tuntutan zaman tersebut jangan sampai berimbas dalam manajemen perpustakaan itu sendiri. Berbagai isu-isu strategis dalam pengembangan perpustakaan digital di antaranya masalah plagiarisme, pelanggaran hak cipta dan masalah preservasi informasi itu sendiri. Lembaga perpustakaan secara lambat laun tapi pasti akan terintegrasi dengan lembaga lain dalam mengembangkan perpustakaan digital sebagai upaya mengembangkan e-government dan upaya efisiensi, efektifitas dan akurasi dalam membangun pelayanan publik.

Dalam implementasinya pada perpustakaan, pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut sebagai berikut : *pertama*, fungsi pendidikan. Perpustakaan didirikan dengan fungsi utama sebagai salah satu sarana yang menunjang pencapaian tujuan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Keberadaannya harus sejalan dengan prinsip sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan sebagai

suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat serta diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Perpustakaan sekolah harus menyediakan dan mengelola berbagai bahan perpustakaan sebagai sumber literatur yang berhubungan dengan pendidikan dan proses belajar-mengajar sehingga dapat berfungsi sebagai tempat dan sumber belajar bagi siswa serta sumber rujukan bagi guru dan petugas administrasi sekolahnya.

Kedua, fungsi repository bahwa fungsi penyimpanan dan pelestarian pada perpustakaan bukanlah fungsi utamanya. Akan tetapi, perpustakaan tetap harus menyimpan dan melestarikan koleksi bahan perpustakaan tercetak atau pun terekam sebagai hasil karya putra bangsa yang masih relevan dan diperlukan oleh masyarakat pemustakanya, yaitu siswa, pendidik, dan staf administrasi sekolah dalam menyokong pencapaian sasaran pendidikan dan pembelajaran para siswanya secara optimal.

Ketiga, fungsi riset, bahwa perpustakaan juga berfungsi sebagai tempat mendapatkan informasi yang mendukung penelitian para siswa dan guru pembimbingnya. Kegiatan penelitian sederhana dapat dilakukan oleh pemakai perpustakaan, mulai dari anak-anak di bangku sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah tingkat atas. Bentuk jasa perpustakaan yang dapat diberikan adalah penyediaan berbagai literatur sebagai bahan rujukan yang menjadi koleksi perpustakaan, baik literatur primer, sekunder, tersier, maupun berbagai alat peraga pendidikan lainnya.

Keempat, fungsi informasi, perpustakaan menyediakan informasi bagi pemustakanya, baik informasi tentang berbagai bahan pustaka yang dimilikinya (cakupan, jenis, penempatan, dan lain-lain), informasi tentang berbagai aktivitas dan

layanan perpustakaan yang ditawarkan, maupun informasi tentang lingkungan sekitar perpustakaan tersebut.

Kelima, fungsi kultural, bahwa perpustakaan juga berfungsi sebagai unit menyimpan khazanah budaya bangsa, yaitu melalui penyimpanan dan pelestarian berbagai bahan pustaka yang memuat khazanah budaya bangsa. Fungsi sebagai pusat sarana budaya ini dapat dilakukan oleh perpustakaan dengan mengadakan berbagai kegiatan, seperti pameran buku, foto, peragaan busana daerah, pentas kesenian, story telling, dan sebagainya. Selain sebagai pusat kultural, perpustakaan pun memiliki fungsi rekreasi budaya yang bersifat literatur, seperti penyediaan buku-buku hiburan, berbagai hikayat, lagu-lagu daerah yang menambah kesegaran rohani, dan sebagainya.

4. Implementasi Nilai Demokrasi Informasi dalam Pengembangan Perpustakaan Digital

Dalam konteks pengembangan perpustakaan digital bahwa nilai demokrasi merupakan nilai Islam yang sangat mempengaruhi keberhasilan tugas, fungsi dan tujuan perpustakaan digital. Nilai Islam multikultural mampu mengembangkan demokrasi, kebebasan dan keterbukaan akses (*open access*). Dalam pengembangan perpustakaan digital dalam membangun aksesibilitas informasi bahwa implementasi nilai-nilai kerjasama diarahkan sebagai berikut : (a) demokrasi dalam memahami keanekaragaman budaya melalui penyediaan informasi yang lengkap melalui pengembangan koleksi pada perpustakaan digital, (b) keterbukaan dalam melayani informasi (*open access*) dalam segmen-segmen layanan perpustakaan digital, (c) memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses dengan mudah, cepat dan tepat, (d) memenuhi kebutuhan informasi berbagai subjek masyarakat yang beraneka ragam. Gambaran implementasi nilai demokrasi pada perpustakaan

perguruan tinggi negeri di Malang Jawa Timur sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.2

Implementasi Demokrasi Informasi dalam Pengembangan Perpustakaan Digital

Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri di Malang Jawa Timur

Subjek	Perguruan Tinggi		
	UB	UM	UIN
<i>Open access</i>	<ul style="list-style-type: none"> Membangun <i>Brawijaya Knowledge Garden (BKG)</i> yang dapat diakses terbuka (<i>open access</i>) melalui Aplikasi <i>Inlis Lite v.3</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan koleksi muatan lokal (MULOK) yang bisa diakses secara terbuka melalui aplikasi Sipadu. 	<ul style="list-style-type: none"> Melestarikan local content (LOCO) yang dapat diakses terbuka pada aplikasi E-Print
<i>interface</i>	<ul style="list-style-type: none"> www.digilib.ub.ac.id 	<ul style="list-style-type: none"> www.lib.um.ac.id 	<ul style="list-style-type: none"> www.digilib.uin.ac.id
<i>user need</i>	<ul style="list-style-type: none"> Memahami kebutuhan informasi pemustaka yang beragam dengan bidang subjek 	<ul style="list-style-type: none"> Memahami kebutuhan informasi pemustaka yang beragam dengan bidang subjek kependidikan. 	<ul style="list-style-type: none"> Memahami kebutuhan informasi pemustaka yang beragam dengan bidang subjek keislaman.
<i>collection management</i>	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan koleksi digital yang beragam yang dapat diakses oleh pemustaka dan terbuka baik secara langsung maupun online. 	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan koleksi digital yang beragam yang dapat diakses secara terbuka baik secara langsung maupun online. 	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan koleksi digital yang beragam yang dapat diakses dengan mudah, cepat dan tepat dan dapat diakses di gedung bersifat tertutup.

Sumber : Sintesis Peneliti

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa strategi pengembangan perpustakaan digital terkait demokrasi informasi pada perpustakaan UB, UM dan UIN Malang memuat proses dinamis baik penyediaan akses, pengembangan koleksi dan pelayanan perpustakaan digital yang beragam berbasis nilai-nilai keragaman budaya. Strategi pengembangan demokrasi informasi dalam pengembangan perpustakaan digital pada Universitas Brawijaya (UB) adalah sebagai berikut : (a) memahami kebutuhan informasi pemustaka yang beragam dengan bidang subjek multidisiplin, (b) menyediakan koleksi digital yang

beragam yang dapat diakses oleh pemustaka dan terbuka baik secara langsung maupun online, (c) mengembangkan koleksi digital yang beragam pada subjek interdisipliner, (d) mengembangkan layanan secara terbuka dalam akses informasi (*open access*) dengan membuka layanan gazebo dan teraz UB, dan (e) menyediakan teknologi informasi digital yang bervariasi baik hardware dan software *Inlis Lite* versi 3.

Sedangkan strategi pengembangan demokrasi informasi dalam pengembangan perpustakaan digital pada Universitas Negeri Malang (UM) adalah sebagai berikut : (a) memahami kebutuhan informasi pemustaka yang beragam dengan bidang subjek kependidikan, (b) Menyediakan koleksi digital yang beragam yang dapat diakses secara terbuka baik secara langsung maupun online, (c) mengembangkan koleksi digital yang beragam pada subjek kependidikan., (d) mengembangkan layanan secara terbuka dalam akses informasi (*open access*) dengan membuka layanan teraz UM dan (e) menyediakan teknologi informasi digital yang bervariasi baik hardware dan software Aplikasi Sipadu.

Kemudian strategi pengembangan demokrasi informasi dalam pengembangan perpustakaan digital pada Universitas Islam Negeri (UIN) Malang adalah sebagai berikut : (a) memahami kebutuhan informasi pemustaka yang beragam dengan bidang subjek keislaman, (b) menyediakan koleksi digital yang beragam yang dapat diakses dengan mudah, cepat dan tepat dan dapat diakses di gedung bersifat tertutup, (c) mengembangkan koleksi digital yang beragam pada subjek keislaman, (d) mengembangkan layanan secara terbuka dalam akses informasi (*open access*) dengan menyediakan layanan baca yang luas di gedung UIN. dan (e) menyediakan teknologi informasi digital yang bervariasi baik *hardware* dan *software* aplikasi *e-print*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Representasi Demokrasi Informasi dalam Pengembangan Perpustakaan dalam Ekosistem Digital

Representasi perpustakaan yang dikembangkan dalam membangun demokrasi informasi dalam pengembangan perpustakaan dalam ekosistem digital adalah sebagai berikut.

1. Keterbukaan Informasi (*Open Access*)

Keterbukaan informasi (*open access*) merupakan trend dan isu internasional dibidang perpustakaan yang memungkinkan perpustakaan dalam menyediakan informasi, mengembangkan koleksi yang beragam dan mengembangkan layanan perpustakaan yang bervariasi secara terbuka. Representasi perpustakaan dalam membangun demokrasi informasi menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam mengembangkan layanan perpustakaan secara terbuka dan memberikan kebebasan mendapatkan informasi. Keberhasilan demokrasi informasi ini masyarakat dapat akses informasi tanpa batas dan tanpa membedakan ras, suku, golongan, kemampuan, status sosial dan gender. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan demokrasi informasi berbasis koleksi digital yang dapat diakses secara *online*.

Masyarakat yang majemuk (*plural*) dimana penduduk dari pelbagai latar belakang etnik, suku, bangsa dan agama berkumpul dan hidup bersama akan menimbulkan tantangan-tantangan tersendiri yang perlu dijawab oleh masyarakat perkotaan dengan mengembangkan sifat-sifat yang cocok dengan keadaan. Sifat-sifat yang cocok dengan keadaan masyarakat inilah yang dimaksud dengan masyarakat madani-multikultural dan tentu saja melibatkan sikap-sikap tertentu yang menjadi tuntutan masyarakat multikultural. Sikap-sikap tersebut antara lain meliputi inklusivisme, humanisme/egalitarianisme, toleransi, dan demokrasi.

Demokrasi informasi dapat ditunjukkan dalam keanekaragaman koleksi yang dihimpun perpustakaan. Secara garis besar, Pendit (2009) menyebutkan bahwa sumber daya informasi digital yang sangat beragam dapat dibagi berdasarkan sifat media, sumber informasi, dan sekaligus isinya, yang antara lain terdiri dari: (a) Bahan dan sumber daya full text, termasuk e-journal, koleksi digital yang bersifat terbuka (*open access*), *e-books*, *e-newspapers*, tesis, dan disertasi digital., (b) Sumber daya metadata, termasuk perangkat lunak digital berbentuk katalog, indeks dan abstrak, atau sumber daya yang menyediakan informasi tentang informasi lainnya (literatur sekunder), (c) Bahan-bahan multimedia digital, (d) Aneka situs di internet.

2. Modernitas Teknologi Informasi

Dalam membangun demokrasi informasi peran perpustakaan dituntut membangun infrastruktur teknologi informasi baik hardware, software maupun jaringan informasi (*networks*) yang memungkinkan masyarakat mengakses dengan cepat, tepat, mudah dan akurat. Modernitas teknologi informasi dalam mengembangkan layanan perpustakaan dapat dilihat dalam penyediaan infrastruktur teknologi informasi, *hardware*, *software*, sistem, jaringan (*networks*) dan teknologi informasi perpustakaan. Modernitas dalam pengembangan perpustakaan menempatkan nilai multikultural sebagai potensi strategis dalam pengembangan perpustakaan digital dalam upaya membangun aksesibilitas informasi. Secara umum unsur-unsur budaya juga mempengaruhi kinerja dan keberhasilan perpustakaan dalam merealisasikan tugas, fungsi dan tujuan perpustakaan. Representasi budaya dan teknologi informasi dalam pengembangan perpustakaan digital sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat.

Infrastruktur teknologi dalam pengembangan perpustakaan digital yang dapat mendasari untuk membangun aksesibilitas informasi pada

pengembangan perpustakaan digital. Nilai budaya teknologi dalam membangun keberagaman, keadilan, kerjasama, toleransi dan etika mampu mendukung dalam implementasi teknologi informasi dalam membangun aksesibilitas informasi melalui pengembangan infrastruktur teknologi informasi, sistem temu balik informasi, organisasi metadata, jaringan internet dan membangun berbagi sumber daya informasi (*resource sharring*)

3. Mengimplementasikan Hukum/Legalitas Informasi dalam Aksesibilitas Informasi

Dalam demokrasi informasi aspek legalitas informasi menjadikan faktor yang sangat strategis bagi perpustakaan dalam ekosistem digital. Jangan sampai kemudahan akses informasi menjadikan dan keterbukaan informasi dicerai oleh etika informasi, pelanggaran hak cipta, plagiarisme bahwa kejahatan informasi (*cybercrime*). Kehadiran demokrasi informasi bagi lembaga perpustakaan mengharuskan kebebasan mencari dan mendapatkan informasi bukan bebas nilai namun juga informasi yang bertanggung jawab.

Konsep aksesibilitas adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan maupun lingkungan. Dalam konsep aksesibilitas informasi menyangkut empat dimensi yaitu aksesibilitas inti, aksesibilitas informasi, kehadalan sistem dan kemudahan memahami bahasa kontrol. Konsep tersebut tidak berhenti hanya sampai pada tersedianya koleksi digital yang melimpah, akan tetapi hal ini dapat terwujud apabila pemustaka dapat mengakses koleksi yang disediakan dengan utuh dan nyaman. Dengan demikian, dapat digaris bawahi bahwa aksesibilitas koleksi digital merupakan usaha untuk dapat memberikan kemudahan pemustaka untuk mendapatkan informasi digital secara penuh, utuh, mudah, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pengembangan layanan perpustakaan tidak bisa keluar kenyataan adanya etika informasi dalam mendapatkan informasi. Penguatan legalitas

informasi memberikan batasan untuk mendapatkan informasi yang benar dan bertanggung jawab. Legalitas informasi sangat ditentukan adanya etika informasi, hak cipta, plagiarisme dan kejahatan informasi (*cybercrime*). Plagiarisme dalam perpustakaan memang erat kaitannya dalam dunia tulis menulis. Maka tidak heran jika isu ini menjadi salah satu penghambat dalam pembangunan perpustakaan digital. Beberapa pimpinan suatu lembaga berpendapat bahwa pembangunan perpustakaan digital dapat menyuburkan praktek plagiarisme. Untuk mengatasi hal tersebut di atas, pustakawan perlu berpartisipasi dalam rangka mencegah terjadinya plagiarisme. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengajarkan kepada pemustaka tentang bagaimana cara mengutip tulisan dengan benar.

4. Membangun Layanan Perpustakaan perpustakaan Berbasis Humanisme

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "humanisme" adalah aliran yang bertujuan menghidupkan rasa perikemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik. Dalam membahas teori humanisme diperlukan orientasi hidup yang universal. Di antara orientasi hidup yang universal ini merupakan titik orientasi bagi pengembangan perpustakaan digital berbasis multikultural yang unsurnya menyangkut nilai kemanusiaan, kebersamaan dan kedamaian.

Dalam Aloni (1999) menjelaskan bahwa orientasi kemanusiaan (*humanity*) dipahami sebagai nilai yang menempatkan peningkatan pengembangan manusia, keberadaanya dan martabatnya sebagai pemikiran dan tindakan manusia yang tertinggi. Sebagai manusia bermartabat, Nibrod Aloni menyebut adanya 3 (tiga) prinsip dalam kemanusiaan yaitu (a) otonomi, rasional dan penghargaan untuk semua orang, (b) kesetaraan dan kebersamaan, serta (c) komitmen untuk membantu semua orang dalam pengembangan potensinya. Jika prinsip pertama

bersifat filosofis, sementara prinsip kedua bersifat sosio-politis, maka prinsip ketiga bersifat pedagogis.

Dalam konteks pengembangan perpustakaan digital bahwa nilai humanisme merupakan nilai Islam yang sangat mempengaruhi keberhasilan tugas, fungsi dan tujuan perpustakaan digital antara lain dalam (a) memahami keanekaragaman budaya manusia melalui penyediaan infrastruktur baik gedung, fasilitas teknologi informasi perpustakaan digital, (b) memahami sistem temu balik informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka yang beraneka ragam, (c) komitmen dalam mengembangkan sistem metadata yang tepat bagi masyarakat yang beragam, (d) mengembangkan sistem informasi dan teknologi informasi dengan lancar guna membangun interoperabilitas antara perpustakaan, (e) menyediakan sistem internet yang memadai dalam berbagi sumber daya perpustakaan digital.

5. Membangun Jaringan Kerjasama Perpustakaan Digital

Dalam membangun demokrasi informasi berkaitan erat dengan kerjasama perpustakaan, karena dengan mengembangkan jaringan kerjasama perpustakaan akan mendapatkan akses yang lebih luas dan memperkaya informasi yang dihasilkan. Kerjasama dan jaringan informasi perpustakaan memungkinkan aksesibilitas informasi semakin meningkat bagi masyarakat luas. Kegiatan kerjasama perpustakaan digital akan dapat membangun kebutuhan masyarakat informasi yang beragam, jasa layanan informasi yang bervariasi dan mengembangkan ketersediaan informasi yang bervariasi.

Kerjasama perpustakaan merupakan kegiatan yang dilakukan dua perpustakaan atau lebih dalam mencapai tujuan bersama. Kerjasama perpustakaan digital dapat dilakukan dengan kerjasama pengembangan sumber daya digital, kerjasama jasa informasi digital dan pengembangan pemanfaatan sumber daya manusia. Nilai multikultural yang

dapat mendasari pengembangan kerjasama antar perpustakaan dalam upaya mencapai kebutuhan informasi bersama. Dalam memahami multikultural bisa dijadikan sebagai salah satu sarana bangsa Indonesia dalam mengelola keberagaman dengan baik sehingga tercipta generasi –generasi unggul yang memiliki sense dalam menghadapi perubahan nilai-nilai akibat perubahan global.

Gambaran Representasi Pengembangan Perpustakaan dapat digambarkan dalam ringkasan tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2
Ringkasan Representasi Demokrasi Informasi pada Perpustakaan Perguruan Tinggi di Malang

Aspek/ Subjek	Perguruan Tinggi		
	UB	UM	UIN
Demokrasi	Demokrasi dengan membangun <i>Brawijaya Knowledge Garden (BKG)</i> yang dapat diakses terbuka (<i>open access</i>) melalui Aplikasi Inlis Lite v.3,	Demokrasi dalam mengembangkan koleksi muatan local (MULOK) yang bisa diakses secara terbuka melalui aplikasi Sipadu.	Demokrasi dalam melestarikan local conten (LOCO) yang dapat diakses terbuka pada aplikasi E-Print
Humanisme	Humanisme membangun fasilitas gazebo digital	Humanisme membangun café pustaka	Humanisme mendayagunakan Corner Pustaka
Keadilan	Keadilan memportalisasi dalam sebuah navigasi kejahatan informasi (<i>cybercrime</i>)	Keadilan melalui mensosialisasi undang-undang hak cipta	Keadilan mengimplementasikan aplikasi plagiarisasi (<i>plagiarism Checker</i>)
Kebersamaan	Kebersamaan membangun jaringan informasi digital (<i>networks</i>)	Kebersamaan mengembangkan kerjasama perpustakaan digital (<i>library cooperations</i>)	Kebersamaan mendayagunakan upaya dalam berbagi sumber daya koleksi digital (<i>resource sha-ring</i>)
Toleransi	Toleransi dalam mengembangkan layanan berbasis teknologi informasi	Toleransi melalui dengan menghargai pengguna kebutuhan informasi	Toleransi dengan membangun kesadaran melalui regulasi akses terbuka secara tertulis

D. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi antara lain ditandai perubahan perilaku masyarakat dalam mendapatkan informasi serta semakin tinggi tuntutan kebutuhan informasi yang sangat bervariasi. Kondisi ini memiliki arti penting bagi lembaga informasi termasuk perpustakaan dalam mengembangkan kualitas layanan perpustakaan.
2. Berbagai perubahan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi menuntut layanan informasi yang cepat, tepat, mudah dan murah serta nyaman tanpa harus datang langsung perpustakaan dapat mengakses informasi. Berbagai faktor penting dalam pengembangan perpustakaan digital yang perlu diperhatikan dalam pembahasan diatas adalah faktor manajemen perpustakaan digital itu sendiri. Komponen manajemen perpustakaan digital perlu dikembangkan adalah membangun demokrasi informasi, modernitas teknologi, mengembangkan layanan informasi berbasis humanisme.
3. Dalam upaya optimalisasi manajemen perpustakaan dalam membangun akses teknologi informasi perlu strategi atau langkah-langkah strategis sebagai bentuk konkrit dari berbagai dimensi antara lain dengan strategi rancang bangun, pengembangan koleksi, manajemen, pendekatan teknologi informasi, hukum dan kultural/budaya. Keberhasilan sebuah pembangunan perpustakaan dari berbagai pendekatan baik demokrasi informasi, modernitas teknologi informasi, penegakan hukum legalitas informasi, membangun kerjasama dan jaringan informasi digital tersebut diharapkan mampu memodernisasikan perpustakaan Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2011). Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren: Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Calhoun, K. (2014). Exploring Digital Libraries: Foundations, Practice, Prospects. London: Facet Publishing.
- Case, D. O. (2012). Looking For Information: A Survey Of Research On Information Seeking, Needs, And Behavior. Emerald.
- Hartono. (2019). Representasi Multikultural Sebagai Strategi Dalam Pengembangan Perpustakaan Digital: Studi Kasus Pada Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri di Malang Jawa Timur. In Lokakarya Ilmiah Nasional : Filosofi Kajian Informasi dan Budaya di Universitas Indonesia. Depok: Universitas Indonesia.
- IFLA. (2009). Multicultural Communities: Guidelines for Library Services. USA: IFLA Multicultural Library Manifesto.
- Saracevic, T. (2001). Digital Library Evaluation Toward an Evolution of Concepts. *Library Trends*, 49(2).
- Suwarno, W. (2016). Library Life Style: Trend dan Ide Kepustakawanan. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kita.